



## IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

(Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Cabang Semarang)

Dwi Sektiono, Rini Nugraheni<sup>1</sup>

Email: [dwisekti13@gmail.com](mailto:dwisekti13@gmail.com)

Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

### ABSTRACT

*This research aims to identify, study and understand the organizational management in the non-profit organization Aksi Cepat Tanggap Semarang branch with the paradigm of good governance. Using a qualitative case study method with a phenomenon know in depth the various resources required.*

*Aksi Cepat Tanggap committed to become a professional non-profit organization that makes growing rapidly to gained trust society. The results of this study show that the Aksi Cepat Tanggap had been applied the principles of good governance. Conclusion this study found that when a non-profit organization to apply the principles of good governance, non-profit organizations may develop rapidly, lasting and gain public confidence.*

*Keywords: Good Governance, LSM, NGO, ACT*

### PENDAHULUAN

Tata kelola organisasi adalah hal yang sangat penting karena dapat membantu bagaimana sebuah organisasi untuk menentukan cara agar dapat mencapai tujuan organisasi itu sendiri. *Good governance* selama ini diketahui hanya diterapkan dalam dunia pemerintahan dan korporasi (*Good Corporate Governance*), namun dewasa ini tidak hanya praktisi pemerintahan dan korporasi saja yang menerapkan prinsip *good governance*, namun organisasi non profit juga dituntut untuk menjadi organisasi yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Seiring berkembangnya zaman, *good governance* yang pada awalnya hanya dijumpai pada organisasi pemerintahan, saat ini dapat dijumpai penerapannya pada organisasi non pemerintahan (Ornop) atau yang kini lebih dikenal dengan istilah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Bastian (2007) mengatakan, *good governance* dalam artian umum adalah tata kelola pemerintahan yang baik, pada umumnya diterapkan dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan. Akan tetapi, *good governance* tidak terbatas hanya pada sektor pemerintahan saja, namun juga terkait dengan penyelenggaraan organisasi publik lainnya, termasuk di dalamnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Di Indonesia pada akhir tahun 1970-an istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) muncul untuk pertama kalinya. Istilah ini merupakan istilah pengganti sebelumnya, yaitu Organisasi Non Pemerintah (Ornop), yang merupakan terjemahan langsung dari istilah dalam bahasa Inggris *Non Government Organization* (NGO). Penggantian istilah Ornop dikarenakan berkonotasi negatif, yaitu seakan-akan melawan pemerintah (Saidi, 1995: 9).

Di Indonesia, ada dua jenis badan hukum untuk menaungi organisasi non profit, yaitu yayasan dan asosiasi. Yayasan pertama kali diakui sebagai badan hukum pada saat zaman kolonial Belanda pada tahun 1870. Biasanya tujuan yayasan adalah sosial, agama, pendidikan, kemanusiaan dan lingkungan. Bentuk lain dari badan hukum yang digunakan oleh LSM adalah asosiasi, yaitu sebuah organisasi yang didirikan oleh sejumlah orang untuk melayani kepentingan anggotanya atau masyarakat. Berbeda dengan yayasan, yang merupakan organisasi non anggota, asosiasi didirikan atas dasar keanggotaan (Hans, dkk., 2005).

---

<sup>1</sup> Corresponding author

Di dalam dunia LSM timbul sebuah fenomena mengenai semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi secara keseluruhan, tuntutan ini terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat. (Bastian, 2007: 75).

Dewasa ini tingkat kepercayaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menurun sejak tahun 2011. Pada tahun 2013, tingkat kepercayaan pada LSM masih di posisi yang cukup tinggi yaitu 61 persen, namun terjadi penurunan pada tahun 2012 menjadi 58 persen. Penurunan terus terjadi hingga 2013. Angka-angka tersebut merupakan hasil survey global Edelman terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada LSM seluruh dunia. Edelman mengungkapkan, bahwa tingkat kepercayaan terhadap LSM secara global berada pada posisi 63 persen. Indonesia berada cukup jauh di bawahnya. Bahkan tingkat kepercayaan pada LSM di Indonesia menjadi yang terendah di antara negara-negara Asia Pasifik (Kemendagri, 2015).

Awaliyah (2015) mengatakan, tuntutan zaman saat ini mengharuskan LSM untuk bekerja dalam lingkungan yang sangat kompetitif. LSM harus meningkatkan kinerjanya agar dapat memberikan kualitas program yang lebih baik serta memberikan hasil yang paling baik dalam mencapai tujuan perubahannya. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh LSM di antaranya yaitu, kapasitas akuntabilitas dan manajemen yang terbatas, kurangnya sumber daya dan peluang untuk meningkatkan kapasitas staf, kurangnya jaringan dan peluang berjejaring antar LSM dalam rangka mendukung lembaga individu maupun sektor LSM, serta kesulitan menjamin pendanaan yang stabil.

Pada LSM secara kelembagaan terdapat adanya pemilik dan pengurus (manajemen). Pemilik adalah seseorang yang mempunyai hak untuk mendelegasikan tugas kepada pengurus (manajemen). Adanya pendelegasian tugas dari pemilik yayasan atau LSM kepada pengelola (manajemen) untuk menjalankan organisasi sesuai visi misi dan tujuan organisasi tersebut. Pendelegasian tugas tersebut dengan menerapkan prinsip - prinsip *good governance*. Dengan pendelegasian yang sesuai dengan prinsip *good governance* maka dapat diketahui bentuk implementasi dari prinsip *good governance* yang dijalankan organisasi tersebut.

Semakin kritisnya masyarakat, menjadikan prinsip-prinsip *good governance* sebagai solusi akan tuntutan profesionalisme pada sebuah organisasi non profit atau LSM. Karena pelaksanaan *good governance* memiliki beberapa prinsip, diantaranya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaraan, efisiensi, efektifitas, profesionalisme, dan pengawasan (Bastian, 2007: 75).

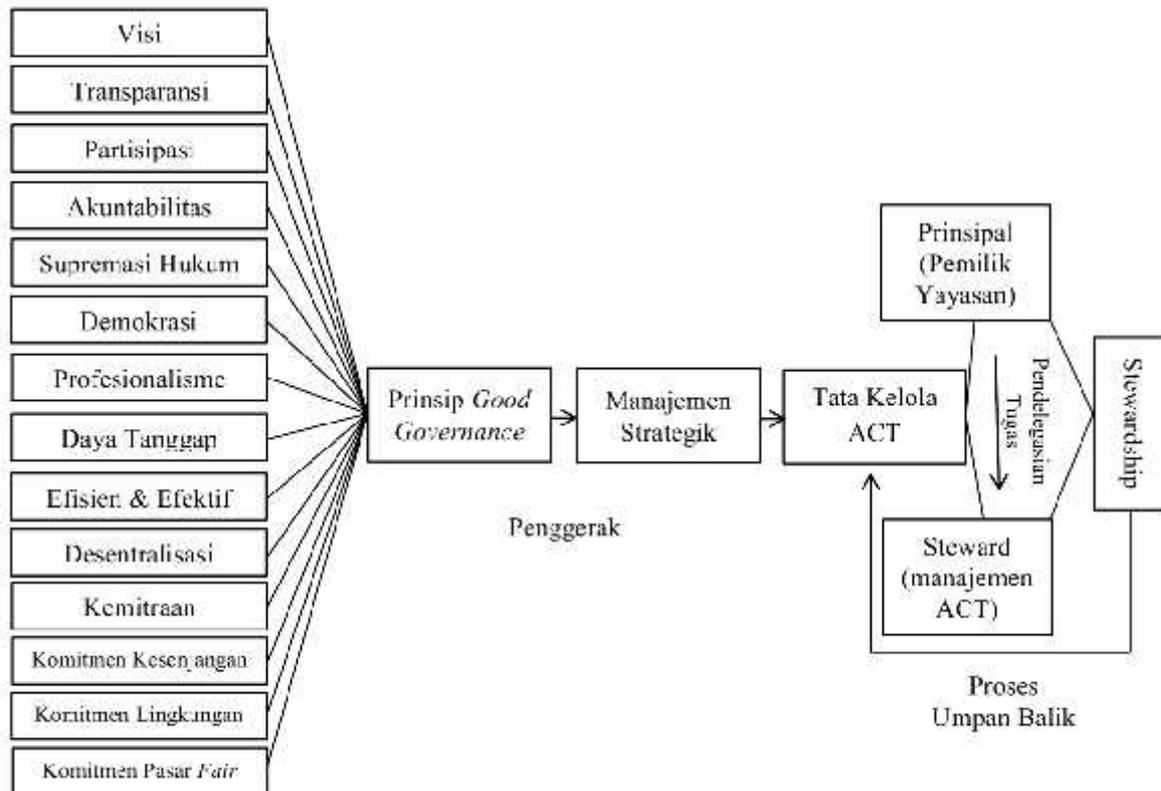
Salah satu LSM di Indonesia yang bergerak pada dunia sosial dan kemanusiaan adalah Aksi Cepat Tanggap yang selanjutnya disebut ACT. Organisasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 21 April 2005 dengan badan hukum sebagai yayasan. ACT berawal dari kegiatan tanggap darurat, kemudian mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti Qurban, Zakat dan Wakaf. ACT bahkan menjadi organisasi yang menginspirasi pemerintah untuk membentuk BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kiprah ACT tidak hanya ditemukan di dalam negeri saja, namun kontribusi ACT dalam bidang kemanusiaan telah melintasi batas negara. Pada skala global, ACT mengembangkan jejaring dalam bentuk *representative person* sampai menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan aktivitas program global sudah sampai ke 22 Negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Indocina dan Eropa Timur. Wilayah kerja ACT di skala global diawali dengan kiprah dalam setiap tragedi kemanusiaan di berbagai belahan dunia seperti bencana alam, kelaparan dan kekeringan, konflik dan peperangan, termasuk penindasan terhadap kelompok minoritas berbagai negara. Melejitnya ACT hingga munculnya kepercayaan publik yang besar merupakan gambaran dari suksesnya manajemen membentuk sebuah tata kelola organisasi yang profesional dengan prinsip *good governance*.

ACT sebagai organisasi yang berkomitmen untuk melebarkan semangat kedermawanan hingga sampai ke pelosok Nusantara tentunya didukung oleh beberapa anak cabang di tingkat provinsi. ACT cabang Semarang merupakan anak cabang ACT yang berkonsentrasi untuk wilayah Jawa Tengah, keberadaannya tentu menginterpretasikan profesionalisme ACT dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi non profit. Melihat fenomena yang telah disebutkan di atas, menarik kiranya untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip *good*

*governance* pada ACT cabang Semarang mengingat organisasi ini merupakan lembaga kemanusiaan profesional yang mempunyai reputasi baik di Indonesia maupun di kancah dunia.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS



Sumber: data yang diolah.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam mengenai tata kelola organisasi ACT cabang Semarang maka dibutuhkan peran serta para karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut, sehingga akan diperoleh data yang kemudian akan digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana tata kelola dan manajemen pada ACT cabang Semarang. Oleh karena data yang akan diolah bukan merupakan data matematis ataupun statistik dan diperlukan pemahaman yang mendalam pada setiap fenomena, maka digunakan metode kualitatif untuk menyempurnakan penelitian ini.

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif yaitu sebuah penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur penghitungan secara statistik (Basrowi dan Suwandi, 2008). Sedangkan menurut Meleong (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Melalui penelitian kualitatif, data yang dihasilkan adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis data di atas, langkah selanjutnya yaitu menginterpretasikan tata kelola organisasi pada ACT cabang Semarang dilihat dari sudut pandang *good governance*. Dari semua teori tentang prinsip-prinsip *good governance*, dalam penelitian ini menggunakan prinsip yang dirumuskan oleh Tim Pengembangan Kebijakan Tata Pemerintahan



yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2005. Alasan pemilihan prinsip ini menjadi landasan teori utamanya yaitu karena secara kronologis, rumusan Bappenas ini adalah yang terbaru, dan rumusan Bappenas ini lebih lengkap sehingga dapat mewakili semua rumusan yang telah ada sebelumnya, selain itu juga rumusan ini adalah hasil dari rumusan lembaga di Indonesia yang ditimbang akan cocok dan relevan apabila dijadikan landasan teori organisasi yang ada di Indonesia pula.

Sebelum membahas lebih dalam mengenai penerapan prinsip *good governance* pada ACT, terlebih dahulu perlu mengidentifikasi pelaksanaan tata kelola organisasi ACT, apakah pelaksanaan organisasi secara formal atau informal. Sebuah organisasi yang *good governance* tentunya adalah sebuah organisasi yang formal, di dalamnya termuat sebuah aturan formal yang menjaga agar organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai aturan. Dari analisis data di atas dapat diidentifikasi bahwa ACT merupakan sebuah organisasi yang formal, di dalamnya terdapat tatanan dan aturan-aturan formal agar fungsi-fungsi dan aturan organisasi dapat dijalankan dengan baik.

Karena yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip *good governance* pada organisasi non profit. Penting kiranya untuk diidentifikasi apakah ACT merupakan sebuah organisasi yang berorientasi profit atau non profit. Dari hasil analisis data di atas, menunjukkan bahwa ACT adalah sebuah organisasi non profit, hal tersebut dapat diketahui dari visi dan misi organisasi. Selain itu program-program di lapangan juga merupakan program sosial dan kemanusiaan yang tidak mengandung unsur pencarian laba. Dari segi keuangan organisasi ini berdiri bukan dari modal yang kemudian untuk diinvestasikan melainkan dari donasi masyarakat yang kemudian akan disalurkan kepada yang berhak melalui serangkaian program sosial dan kemanusiaan.

Di Indonesia setiap organisasi di golongan berdasarkan bentuknya, penting kiranya untuk mengidentifikasi bagaimana bentuk organisasi ACT dipandang dari segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dari analisis data di atas, dapat diidentifikasi bahwa ACT adalah organisasi yang berbentuk LSM atau lembaga Swadaya Masyarakat didasarkan atas peraturan Inmendagri. ACT berbentuk LSM karena ACT merupakan sebuah organisasi non profit yang diprakarsai oleh keswadayaan masyarakat.

Sebuah organisasi yang *good governance* tentunya adalah sebuah organisasi yang legal, yang mempunyai kekuatan dan payung hukum. Oleh karena itu, perlu mengidentifikasi apakah ACT merupakan sebuah organisasi yang legal atau ilegal. Dari analisis data di atas, ACT merupakan sebuah organisasi yang legal dan mempunyai kekuatan di mata hukum. Terdapat dokumen legal pemerintah yang menerangkan bahwa ACT adalah organisasi legal dan sah di Indonesia.

Sampai di sini sudah dapat teridentifikasi bahwa ACT adalah sebuah organisasi yang pelaksanaan organisasinya dilakukan secara formal, ACT adalah organisasi non profit, ACT berbentuk LSM dengan bentuk hukum yayasan yang legal dan sah di Indonesia.

Sebelumnya, untuk mengidentifikasi penerapan prinsip *good governance* pada manajemen ACT maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan cara membandingkan antara manajemen ACT yang berlangsung selama ini dengan prinsip-prinsip *good governance* yang telah ada. Untuk mengetahui manajemen di ACT, maka yang perlu untuk diidentifikasi adalah bagaimana ACT menyusun strategi manajemen untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Jika dilihat dari sisi manajemen, ACT telah mendesain sebuah strategi manajemen yang strategik sehingga ACT dapat berkembang dengan pesat. Sebuah organisasi dapat dikatakan telah memiliki manajemen yang strategik apabila telah memiliki ciri-ciri berikut ini:

Pertama, perencanaan secara besar. Dari analisis data di atas, manajemen ACT telah membuat sebuah perencanaan besar yang strategik dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari sepak terjang dan sejarah ACT di awal berdiri dan kiprahnya hingga sampai saat ini yang berkembang pesat. Pencapaian ACT saat ini adalah keberhasilan ACT dalam sebuah perencanaan besar, sebuah konsep organisasi yang dicerminkan dalam visi dan misi dan kemudian direalisasikan dalam sebuah program yang realistis. Dari sini dapat terlihat bahwa ACT telah berhasil merumuskan manajemen yang strategik yang terbukti dari keberhasilan ACT saat ini menjadi sebuah organisasi sosial dan kemanusiaan yang terpercaya di Indonesia. Jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip *good governance*, perencanaan yang besar ini



merupakan sebuah keberhasilan ACT dalam menerapkan salah satu prinsip *good governance* yaitu Visionary atau wawasan masa depan yang baik.

Kedua, rencana strategis yang berorientasi ke masa depan. Melalui visi organisasi akan terlihat cita-cita organisasi tersebut. ACT sejak awal berdirinya mempunyai visi untuk bisa menjadi sebuah organisasi kemanusiaan di tingkat global, dan kini melalui serangkaian program internasional, ACT telah menapaki langkah awal dalam perwujudan mimpi tersebut. Dalam keberhasilan ACT hingga sampai saat ini tidak lepas dari konsep strategis yang berorientasi ke masa depan yang tertuang ke dalam sebuah visi dan misi.

Ketiga, memiliki visi dan misi yang kuat. Visi dan misi ACT merupakan bagian dari rencana strategis yang berorientasi masa depan, hal ini relevan dengan prinsip *good governance* yaitu memiliki visi dan misi yang kuat. ACT telah membuktikan bahwa visi dan misi yang disusun ACT adalah sebuah cita-cita yang realistis dan kini telah terwujud menjadi sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang terpercaya. Dapat dilihat bahwa visi dan misi ACT mempunyai nilai filosofi dan kuat. Visi misi tersebutlah yang telah disusun oleh manajemen pusat sebagai hal prinsip yang di desain sedemikian rupa untuk melandasi setiap kegiatan ACT.

Keempat, yaitu penjabaran dalam rencana operasional. ACT melakukan kegiatan operasional dan program-program hasil dari penjabaran visi dan misi yang melandasi organisasi tersebut, dengan visi dan misi kuat maka misi misi dalam bentuk program akan lebih efektif untuk dilakukan. Penjabaran dalam program ini relevan dengan prinsip *good governance* yaitu profesionalisme. ACT selalu melakukan kegiatan dengan profesional dan sesuai prosedur standar yang telah disusun sebelumnya.

Kelima, pelibatan manajemen puncak. ACT cabang Semarang tidak berdiri sendiri, namun terkoordinasi dengan ACT pusat, sistem desentralisasi juga sejalan dengan prinsip *good governance*, keuntungannya adalah segala pengendalian masih dapat dipantau dan diawasi dari pusat, namun tidak membatasi kewenangan cabang untuk mengambil keputusan secara cepat ketika harus melakukan tindakan yang bersifat penting dan darurat. Selain itu, pelibatan manajemen puncak dalam ACT ketika dalam urusan keuangan akan selalu terkoordinasi oleh pusat.

Keenam adalah pengimplementasian dalam program. Sebuah manajemen yang strategik dan ditambah dengan visi dan misi yang kuat maka akan berpengaruh terhadap program-program yang akan dijalankan. Untuk ACT cabang Semarang melandaskan setiap aksi dan programnya berdasarkan visi dan misi tersebut, agar sesuai dengan cita-cita dan tujuan organisasi. Visi dan misi yang kuat akan dapat tercermin dari program yang dijalankan. Karakteristik ini relevan dengan prinsip *good governance* yaitu keefektifan dan keefisienan. Dengan visi dan misi maka program akan lebih terarah dan realistis. Dengan begitu perencanaan untuk pelaksanaan program akan dapat diantisipasi menegani faktor yang menghambat atau mendorong demi terlaksananya program tersebut, maka pengimplementasian program akan dapat direncanakan dengan baik sehingga program dapat berjalan efisien dan efektif.

Dari data-data di atas dapat diketahui bahwa antara manajemen strategik yang ada di ACT mempunyai relevansi atau kesinambungan dengan beberapa prinsip-prinsip *good governance*. Yang paling penting dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip *good governance* secara utuh merasuk ke sendi-sendi organisasi ACT yaitu dengan cara membandingkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Berikut ini adalah hasil interpretasi prinsip-prinsip *good governance* dengan pelaksanaan tata kelola organisasi ACT cabang Semarang:

Pertama adalah wawasan. Pimpinan pusat atau manajemen puncak ACT telah menyadari akan pentingnya sebuah visi. Oleh karena itu maka disusunlah sebuah visi yang kuat untuk mendasari ACT agar dapat secara efektif dan efisien mencapai tujuan organisasi di masa depan. Sebuah organisasi yang dikatakan *good governance* dipandang harus memiliki sebuah wawasan ke depan atau visioner, tidak secara teknis organisasional saja, akan tetapi, adanya sosok pemimpin yang visioner juga dapat memberikan penerubahan ke arah yang lebih baik. Di dalam ACT sendiri, khususnya ACT cabang Semarang, Sri Suroto selaku kepala cabang dinilai oleh bawahannya sebagai seorang pemimpin yang dapat memberikan panutan dan selalu mempunyai ide-ide segar, dapat dikatakan bahwa Sri Suroto adalah sosok pemimpin yang visioner.

Kedua, keterbukaan informasi. ACT sangat menjunjung keterbukaan informasi. Berbagai upaya dilakukan untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Salah satunya adalah melalui

website resmi ACT yaitu dengan cara menjadikannya sebagai salah satu portal untuk berkomunikasi dengan masyarakat terutama donatur, yaitu sebagai wadah untuk mempublikasi atas program kerja yang dilakukan, dan mempublikasi laporan keuangan tahunan secara real time dan lain-lain.

Ketiga, partisipasi masyarakat. ACT sebagai organisasi sosial dan kemanusiaan tidak lepas dari masyarakat. Bahkan ACT sendiri masih dapat berdiri tegak sampai saat ini karena adanya dukungan dari masyarakat. Salah satu prinsip sebuah organisasi dikatakan memiliki tata kelola yang baik salah satunya adalah mempunyai hubungan baik dengan masyarakat dan selalu melibatkan diri dengan masyarakat. Di lapangan ACT melalui serangkaian program telah terbukti proaktif dalam menjalin hubungan dan memfasilitasi masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dan terlibat dalam segenap aktifitas ACT. Salah satunya yaitu dengan wadah MRI.

Keempat, akuntabilitas. ACT sangat menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan. Misalnya dalam ranah keuangan, ACT sangat menjunjung akuntabilitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat. ACT selalu mempublikasikan hasil keuangan yang telah diaudit oleh lembaga audit eksternal dan mempublikasikan setiap penyaluran dana kemanusiaan melalui website resmi.

Kelima adalah supremasi hukum. Sebagai sebuah organisasi sosial dan kemanusiaan yang menghimpun dana dari masyarakat, ACT haruslah mempunyai perlindungan dari payung hukum, karena jika sebuah organisasi tidak legal menarik dana dari masyarakat tanpa adanya izin yang sah dapat dipastikan organisasi tersebut telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, untuk melindungi setiap aktifitas organisasi dan wujud akan kepatuhan akan hukum yang berlaku, ACT mendaftarkan diri ke pemerintah sehingga ACT menjadi organisasi yang berbadan hukum yayasan, hal untuk memberikan kepercayaan dan kenyamanan di masyarakat bahwa ACT adalah organisasi yang kredibel dan patuh hukum.

Keenam, demokrasi. Terjaminnya fasilitas dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau aspirasi adalah ciri dari demokrasi. Demokrasi tidak hanya terdapat pada kehidupan bernegara, namun demokrasi juga ada pada kehidupan organisasi. Organisasi yang memberikan fasilitas dan kesempatan anggotanya untuk mengutarakan pendapat dinamakan sebuah organisasi yang demokratis. Dari analisis data di atas diidentifikasi bahwa ACT adalah organisasi yang demokratis, dimana suara atau aspirasi setiap anggota organisasi dalam hal ini adalah karyawan ACT dapat didengarkan dan dipertimbangkan untuk di musyawarahkan hingga mencapai mufakat. Hal tersebut terlihat dari sosok pemimpin yang selalu terbuka dan memposisikan diri sebagai mentor yang dapat menjadi tempat untuk beraspirasi.

Ketujuh, profesionalisme dan kompetensi. Seorang dikatakan profesional jika dalam melakukan sesuatu pekerjaan dengan kompetensi yang dimiliki. Di ACT seseorang yang menduduki posisi tertentu atau jabatan tertentu haruslah seseorang yang berkompoten di bidangnya, bahkan dalam sebuah proses rekrutmen pegawai baru, ACT melibatkan psikolog untuk mencari kandidat yang sesuai. Meskipun ACT adalah organisasi non profit akan tetapi profesionalisme dalam berorganisasi selalu diupayakan yang terbaik, sebagai contoh ketika melakukan rekrutmen karyawan baru akan menggunakan test psikologi untuk mengetahui kepribadian calon karyawan agar dapat menentukan orang yang tepat dan cocok dengan kultur organisasi ACT, selain itu juga untuk mengetahui kompetensi akademik dari calon karyawan. Profesionalisme seperti inilah yang dibangun oleh ACT sehingga kepercayaan terhadap organisasi di mata masyarakat dapat tumbuh.

Kedelapan, daya tanggap. Kecepatan sebuah organisasi dalam merespon setiap fenomena yang ada menjadi salah satu prinsip penting untuk sebuah organisasi dapat dikatakan memiliki tata kelola yang baik. Dari analisis data di atas dapat diidentifikasi bahwa ACT memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap fenomena yang ada di lapangan, hal tersebut merupakan komitmen ACT seperti yang ada pada namanya yaitu profesional dalam menanggapi setiap fenomena sosial atau pun kebencanaan. Dalam sebuah wawancara pribadi dengan Sri Suroto mengatakan bahwa, kecepatanggap ACT merupakan ruh dan karakter ACT, karena komitmen tersebut penamaan Aksi Cepat Tanggap adalah wujud dari komitmen ACT untuk memiliki respon yang cepat.

Kesembilan, keefektifan dan keefisienan. Organisasi yang *good governance* adalah organisasi yang dalam pelaksanaan organisasinya selalu dalam perencanaan dan perhitungan yang baik, sehingga apa yang dikerjakan dapat efisien dan efektif. Salah satu contoh keefektifan dan keefisienan ACT dalam mengelola organisasi adalah ketika menyusun sebuah struktur organisasi,



dengan susunan struktur organisasi tersebut tidak ada ketumpang tindihan antara tugas dan kewajiban satu sama lain, tidak ada rangkai jabatan sehingga tidak ada orang yang mempunyai job desk yang sama, oleh karena itu dapat dikatakan ACT adalah organisasi yang efisien dan efektif.

Kesepuluh, desentralisasi. Ketika setiap pengambilan keputusan harus melalui serangkaian proses terutama perijinan pada pusat maka organisasi tersebut dinamakan organisasi yang tersentralisasi, sedangkan lawan dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu sebuah pelimpahan wewenang yang tidak harus melalui jalur pusat, kelebihan desentralisasi adalah kecepatan dalam pengambilan keputusan. Pada ACT sendiri setiap kepala cabang dapat mengambil keputusan tertentu dengan cepat tanpa harus melalui birokrasi persetujuan dengan pimpinan pusat, hal yang demikian dapat membuat setiap tindakan dapat diputuskan dengan cepat. Dengan kata lain, manajemen ACT dalam rangka untuk berkomitmen dalam memberikan sebuah respon dan pelayanan yang cepat, menerapkan prinsip desentralisasi dalam pengambilan keputusan.

Kesebelas, kemitraan. Organisasi yang berhasil menjalin kemitraan baik dengan pihak swasta maupun masyarakat dikatakan sebagai sebuah organisasi yang berhasil. Berhasil membangun mitra berarti organisasi tersebut telah memiliki kepercayaan di mata masyarakat. Dari hasil analisis data di atas diidentifikasi bahwa ACT adalah salah satu organisasi non profit yang mempunyai banyak mitra, selain mitra dalam bentuk korporat atau organisasi yang bekerja sama dalam bidang kemanusiaan juga terdapat kemitraan yang sinergis anatar ACT dengan masyarakat, yaitu dengan adanya wadah MRI atau Masyarakat Realawan Indonesia. ACT memberikan wadah bagi masyarakat untuk ikut terlibat bersama ACT dalam aksi kerelawanan dan kemanusiaan.

Keduabelas, komitmen terhadap kesenjangan. Dari hasil analisis data di atas dapat diketahui bahwa ACT adalah organisasi sosial dan kemanusiaan yang memiliki program-program dengan tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan, dengan kata lain ACT turut berkontribusi untuk pengentasan kesenjangan di masyarakat.

Ketigabelas, komitmen pada lingkungan hidup. Pada zaman global ini, isu-isu lingkungan kian bermunculan, mulai dari pemanasan global, polusi hingga kebakaran hutan. Organisasi yang turut serta mengambil peran dalam isu-isu lingkungan menjadi salah satu syarat bahwa organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai organisasi yang memiliki tata kelola yang baik. Dari analisis data di atas, baik secara langsung maupun tak langsung, dapat diketahui bahwa ACT memiliki beberapa program yang menasar ke lingkungan alam atau yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan. Program seperti water and sanitation program, green for humanity adalah program yang secara langsung menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan.

Yang terakhir yaitu komitmen pada pasar yang *fair*. Jika dalam organisasi non profit tidak ada persaingan antara satu sama lain untuk memenangkan pasar. Tapi justru sebuah kolaborasi untuk bekerja sama satu sama lain untuk bersatu dalam wujud aksi sosial. ACT memiliki komitmen untuk bersinergi dengan organisasi sosial dan kemanusiaan lain untuk lebih mencapai kemaslahatan bersama. Salah satu indikator sebuah organisasi memiliki komitmen besar terhadap pasar adalah ketika tidak adanya monopoli, dalam hal ini ACT sebagai organisasi non profit tidak melakukan monopoli terhadap suatu program sosial dan kemanusiaan, justru ACT turut serta berkolaborasi dengan organisasi lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ACT cabang Semarang adalah organisasi sosial dan kemanusiaan non profit yang berhasil mengembangkan organisasi sehingga dapat berkembang dengan cepat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas dikarenakan dalam tata kelola organisasinya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis yang menunjukkan bahwa dalam tata kelola organisasi ACT cabang Semarang teridentifikasi semua prinsip-prinsip *good governance*.

Dengan demikian, prinsip-prinsip *good governance* seperti prinsip akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum dan profesionalisme apabila diimplementasikan pada organisasi non profit akan memberikan dampak positif yang mendorong kepada kemajuan organisasi dan dapat meningkatkan kepercayaan organisasi di mata masyarakat.

**REFERENSI**

- Alawiyah, Tuti. 2015. *Tren, Tantangan dan Strategi dalam Manajemen Sumber Daya Manusia dan Regenerasi Kepemimpinan LSM di Indoensia*. <http://www.ksi-indonesia.org/id/index.php/publications/2015/12/16/78/nssc-publication-research-series-3-trends-tren-tantangan-dan-strategi-dalam-manajemen-sumber-daya-manusia-dan-regenerasi-kepemimpinan-lsm-di-indonesia-oleh-tuti-alawiyah.html>. Diakses pada 25 September 2016.
- Allison, Michael dan Jude Kaye. 2004. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba: Pedoman Praktis dan Buku Kerja*. Jakarta: Yayasan Obor Indoensia.
- Asna, Ahmad Husnan. 2011. Implementasi *Good Ornop Governance* (Studi Terhadap Pengalaman YLPMD Lampung dalam Membangun Internal *Governance*). Universitas Lampung.
- Atlov, Hans., Rustam Ibrahim, dan PeterVan Tuijl. 2005. *NGO Governance and Accountability in Indonesia: Challenges in a Newly Democratizing Country*. [https://www.researchgate.net/publication/237746635\\_NGO\\_GOVERNANCE\\_AND\\_ACCOUNTABILITY\\_IN\\_INDONESIA\\_CHALLENGES\\_IN\\_A\\_NEWLY\\_DEMOCRATIZING\\_COUNTRY](https://www.researchgate.net/publication/237746635_NGO_GOVERNANCE_AND_ACCOUNTABILITY_IN_INDONESIA_CHALLENGES_IN_A_NEWLY_DEMOCRATIZING_COUNTRY). Diakses pada 25 September 2016.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Bawono, Icuk Rangga. N.d. *Manajemen Sektor Publik: Langkah Tepat Menuju Good Governance*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jendral Soedirman.
- Hadiwinata, Bob Sugeng, 2002, "Practicing Good Governance in Indonesia: NGOs Experience", *Proceedings of International Conference on Good Governance: Perspectives and Practices, Brunei Darussalam*. Parahyangan Catholic University.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. 2004. "Practicing Good Governance in Indonesia: Practiing NGO's Experience".
- Hartanto, Frans Mardi. 2009. *Paradigma Baru Manajemen Indonesia: Menciptakan Nilai Dengan Bertumpu Pada Kebijakan Yang Berpotensi Insani*. Jakarta: Mizan Pustaka
- Hermawan, Dedy, dkk. 2011. "Akuntabilitas Eksistensi Organisasi Non Pemerintah dalam Perspektif Governance Studi Terhadap Yayasan Lembaga Pembinaan Masyarakat Desa Lampung". *Jurnal Borneo Administrator* Vol. 7 No. 11.
- Juliandi, Azuar, dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press
- Kaihatu, Thomas S. 2006. "Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indoensia." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.*, Vol 8, No. 1, pp. 1-9
- Kamaraj, J. dan Pragadeeswaran. 2010. "Governance in Non Governmental Organizations". *Asian Journal of Science and Technology*, Vo. 8, pp.150-155.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008. Jakarta: Balai Pustaka.



- Keraf, Sony. 1998. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahardika, Friska. 2012. "Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan". Skripsi. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.
- Meleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulda, Rahmayandi dan Suranto. 2014. "Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Makasar dalam Mewujudkan Good Governance Tahun 2010-2012". Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik. Vol 1 No. 3.
- Mundayati, N. 2014. *Membangun Kerajaan Bisnis Kepemimpinan Wibowo*. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Naja, Hassanudin Rahman Daeng. 2004. *Manajemen Fit and Proper Test*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama
- Nawawi, H. Hadari. 2012. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pierce II, John A. dan Richard B. Robinson, Jr. 2008. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*. 10 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Ramadhaniaty, Nia. 2014. *Kajian Audit Manajemen Pengetahuan Pada Organisasi Non Pemerintah Studi Kasus Rimbawan Muda Indonesia*. Skripsi. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Pertanian Bogor.
- Robbins, Steppen, P dan Timothy A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Ed. 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Roberts, Albert R dan Gilbert J. Grenee. 2009. *Buku Pintar Pekerja Sosial*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Saidi, Zaim. 1995. *Secangkir Kopi Max Havelar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Santana K, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sarinah, dkk. 2016. *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan PPKN Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Deepublish
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono, Jonathan. 2011. *Mixed Methods: Cara menggabung Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Buku 3. Jakarta: Mandar Maju.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.



- Septiyani, Try. 2015. "Kepemimpinan Ignasius Jonan Dalam Transformasi PT Kereta Api Indonesia: Sudut Pandang Bawahannya". Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiawan, Dedhy. 2007. *Akuntansi Nirlaba Menggunakan Accurate*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta: yayasan Obor Indonesia
- Susilo, Wilhelmus Hary. 2010. *Penelitian Kualitatif Aplikasi Pada Ilmu Kesehatan*. Jakarta: Nulisbuku.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Tasmara, Toto. 2006. *Spiritual Centered Leadership*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tobari. 2015. *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish
- <http://act.id/> <http://kerja-ngo.com/>
- <http://keuanganlsm.com/>
- <http://lingkarlsm.com/>